



**Journal of Human And Education**  
Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 40-45  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Edukasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa Melalui Pelatihan Tata Kelola dan Transparansi Anggaran**

**Deny Susanto**

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia  
Email: deny.susanto@gmail.com

### **Abstrak**

Pemerintahan desa merupakan salah satu elemen penting dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Kualitas tata kelola pemerintahan desa sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Namun, masih terdapat banyak kendala dalam hal tata kelola dan transparansi anggaran di tingkat desa, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan keterampilan aparatur desa. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran edukasi, khususnya pelatihan tata kelola dan transparansi anggaran, dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus di beberapa desa di Jakarta Utara, pengabdian kepada masyarakat ini menemukan bahwa pelatihan yang terfokus pada aspek tata kelola dan transparansi anggaran dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan akuntabel. Pengabdian masyarakat ini dapat merekomendasikan pelaksanaan program edukasi berkelanjutan yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung peningkatan kualitas pemerintahan desa.

**Kata Kunci:** Edukasi, Kualitas Pemerintahan, Pemerintahan Desa, Tata Kelola, Transparansi Anggaran

### **Abstract**

Village government is one of the important elements in the government structure in Indonesia. The quality of village governance greatly determines the effectiveness of the implementation of development programs and public services at the local level. However, there are still many obstacles in terms of governance and budget transparency at the village level, which are often caused by a lack of understanding and skills of village officials. This community service aims to explore the role of education, especially governance training and budget transparency, in improving the quality of village government. Through a qualitative approach and case studies in several villages in North Jakarta, this community service found that training focused on aspects of governance and budget transparency can significantly improve the ability of village officials to carry out government functions effectively and accountably. This community service can recommend the implementation of continuing education programs involving various stakeholders, including local governments and non-governmental organizations, to support the improvement of the quality of village government.

**Keywords:** Budget Transparency, Education, Governance, Government Quality, Village Government

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal. Namun, tantangan dalam tata kelola dan transparansi anggaran masih menjadi masalah yang signifikan di banyak desa di Indonesia. Masalah ini sering kali diselesaikan pada kurangnya pemahaman aparatur desa tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa di Jakarta Utara. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa, diperlukan program pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan, yang mampu membekali aparatur desa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka secara lebih efektif dan akuntabel. Pelatihan tata kelola dan transparansi anggaran desa menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa (Aldi, 2024; Bahtiar, 2023). Pelatihan ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan pemahaman yang sering terjadi di kalangan aparatur desa, terutama terkait bagaimana anggaran desa seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel. Kegiatan pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga untuk melibatkan peserta dalam praktik langsung melalui simulasi dan studi kasus-kasus yang relevan dengan situasi mereka sehari-hari. Tata kelola yang baik dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa adalah dua pilar utama yang dapat mencegah penyelewengan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Melalui pelatihan yang sistematis, aparatur desa diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga anggaran desa dapat dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, pelatihan ini juga memberikan wawasan tentang risiko hukum yang dapat dihadapi jika terjadi pembatasan anggaran, sehingga mendorong aparatur desa untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka. Pemahaman tentang aspek hukum dalam pengelolaan anggaran desa sangat penting untuk mencegah praktik-praktik yang dapat melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan sanksi. Aparatur desa perlu menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil terkait penggunaan anggaran memiliki makna hukum, dan ketidakpatuhan terhadap aturan dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius, baik secara administratif maupun pidana (Alfian Septyandi, 2023; Harianto, Mudji Rahardjo, 2022; Wardana, 2019). Pelatihan ini tidak hanya memperkuat kemampuan teknis dalam mengelola anggaran, tetapi juga memperdalam pemahaman peserta tentang tanggung jawab hukum yang melekat pada posisi mereka sebagai pengelola keuangan desa. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari berbagai unsur pemerintahan desa di Jakarta Utara. Dalam pelatihan ini, peserta diberikan kesempatan untuk berinteraksi, berdiskusi, dan bertukar pengalaman terkait tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola anggaran desa. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga membangun jaringan kerja yang lebih kuat antara desa-desa yang berbeda, yang pada akhirnya dapat saling mendukung dalam penerapan praktik-praktik tata kelola yang baik. Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa, yang diharapkan akan berdampak positif dalam jangka panjang terhadap pembangunan desa di Jakarta Utara (Manghayu, 2018; Sangian et al., 2018). Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, serta pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab hukum, aparatur desa dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami bagaimana pelatihan tata kelola dan transparansi anggaran desa dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung di Jakarta Utara dan melibatkan 50 peserta

yang terdiri dari aparatur desa. Data dikumpulkan melalui beberapa metode utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan aparatur desa yang mengikuti pelatihan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai kondisi tata kelola dan transparansi anggaran sebelum dan sesudah pelatihan, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kedua, selama pelatihan, peserta diberikan materi komprehensif mengenai tata kelola pemerintahan desa, transparansi anggaran, dan akuntabilitas. Pelatihan ini meliputi sesi teori dan praktik, dimana peserta dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari melalui simulasi dan studi kasus. Aspek hukum yang mengatur pengelolaan anggaran desa juga menjadi fokus utama untuk memastikan peserta memahami risiko hukum yang terkait dengan anggaran. Observasi langsung dilakukan selama pelatihan berlangsung dan dalam kegiatan sehari-hari di pemerintahan desa setelah pelatihan. Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan terjadi dalam praktik tata kelola dan transparansi anggaran desa. Dokumen-dokumen terkait tata kelola dan anggaran desa, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan keuangan, dan dokumen pengawasan, dianalisis untuk menilai sejauh mana pelatihan berdampak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Analisis ini memberikan gambaran mengenai perubahan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran desa setelah pelatihan. Melalui kombinasi wawancara, pelatihan, observasi, dan analisis dokumen, metode ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak pelatihan terhadap peningkatan tata kelola dan transparansi anggaran desa di Jakarta Utara.

Tabel 1. Tahapan pengabdian kepada masyarakat pada pemerintahan desa melalui pelatihan tata kelola dan transparansi anggaran Desa di Jakarta Utara

Tahapan	Deskripsi
1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan	a. Survei awal untuk mengidentifikasi masalah utama dalam tata kelola dan transparansi anggaran.
	b. Diskusi dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan masukan.
2. Perencanaan Program Pelatihan	a. Materi pelatihan yang fokus pada APBDes, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan keuangan.
	b. Susun jadwal pelatihan
3. Koordinasi dengan Pemerintah Desa	a. Koordinasi izin dan dukungan logistik dengan pemerintah desa.
	b. Melakukan sosialisasi awal kepada perangkat desa dan masyarakat.
4. Pelaksanaan Pelatihan	a. Melaksanakan sesi pelatihan teori tata kelola dan transparansi anggaran.
	b. Mengadakan simulasi dan praktik langsung, serta diskusi dan tanya jawab.
5. Monitoring dan Evaluasi	a. Lakukan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta.
	b. Mengadakan observasi lapangan untuk menerapkan prinsip hasil pelatihan.
6. Pendampingan Pasca-Pelatihan	a. Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan berkelanjutan.
	b. Merancang program pelatihan lanjutan yang lebih mendalam.
7. Pelaporan dan Publikasi	a. Membuat laporan akhir tentang pelaksanaan dan hasil pelatihan.
	b. Mempublikasikan hasil pelatihan untuk meningkatkan transparansi dan menginspirasi

Tahapan	Deskripsi
	desa lain.
8. Penguatan Kapasitas Masyarakat	Melibatkan masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan dan pembentukan tim pengawas desa untuk memastikan tidak adanya tata kelola yang baik dan transparansi anggaran.

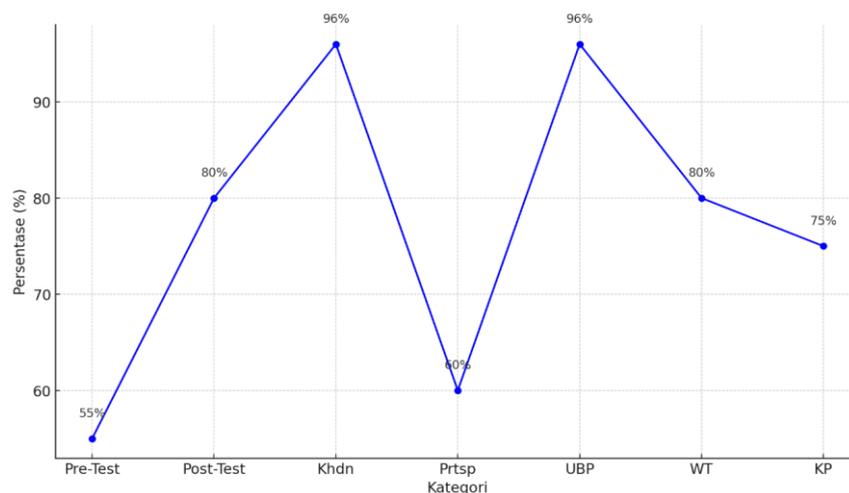
Tabel 2. Data Kualitatif

Kategori	Detil
Umpan Balik Peserta	Komentar Positif: "Pelatihan ini sangat membantu saya memahami bagaimana anggaran desa seharusnya dikelola dengan transparan." Masukan untuk Perbaikan: "Waktu yang diberikan untuk sesi diskusi bisa diperpanjang." Kesan Positif: "Simulasi yang dilakukan sangat menarik dan memberikan gambaran nyata tentang pengelolaan anggaran desa."
Fasilitator Observasi	Keterlibatan Peserta: Peserta sangat aktif selama pelatihan, terutama dalam sesi simulasi dan diskusi kelompok. Perubahan Sikap: Peserta yang awalnya pasif menjadi lebih aktif dalam mengajukan pertanyaan dan berdiskusi. Kesadaran yang Meningkat: Peserta menyadari pentingnya transparansi dan komitmen untuk menerapkannya di desa masing-masing.
Wawancara dengan Peserta	Peserta 1: "Saya baru menyadari betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran desa." Peserta 2: "Materi tentang hukum dan risiko anggaran sangat membuka mata saya."
Analisis Wawancara	Tema Utama: Peserta menyatakan bahwa pelatihan ini memberikan pengetahuan baru yang penting, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Perubahan Pemahaman: Sebagian besar peserta menyatakan bahwa pemahaman mereka tentang tata kelola dan transparansi anggaran meningkat secara signifikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa pelatihan tata kelola dan transparansi anggaran memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas pemerintahan desa. Aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam kegiatan sehari-hari. Pelatihan ini juga membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih inklusif dan akuntabel. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini juga mengungkapkan bahwa peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola yang baik dan transparansi anggaran tidak hanya terbatas pada aspek teoritis, tetapi juga tercermin dalam perubahan nyata di lapangan. Misalnya, beberapa desa yang mengikuti pelatihan mulai menerapkan praktik transparansi dengan lebih aktif, seperti mempublikasikan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara terbuka kepada masyarakat

melalui papan pengumuman dan media sosial desa. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga memotivasi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa juga menjadi salah satu dampak signifikan dari pelatihan ini. Masyarakat yang sebelumnya kurang terlibat kini mulai menunjukkan minat yang lebih besar dalam mengikuti musyawarah desa dan memberikan masukan yang konstruktif terkait alokasi anggaran dan prioritas pembangunan. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam pengambilan keputusan menjadi lebih demokratis dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat desa. Dari sisi akuntabilitas, aparat desa yang telah dilatih menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya kinerja dalam setiap tindakan yang mereka ambil, terutama terkait dengan anggaran pengelolaan. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankannya dan lebih cenderung mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Secara keseluruhan, pelatihan ini berperan penting dalam membangun fondasi pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di Jakarta Utara



Gambar 1. Hasil Tata Kelola dan Transparansi Anggaran

Pra-Tes : Sebelum pelatihan

Post-Test : Setelah pelatihan

Khdn : Kehadiran

Prtsp : Partisipasi

UBP : Umpan Balik Positif

WT : Wawasan Transparansi

KP : Komitmen Penerapan

Hasil Evaluasi Tes , terlihat perbandingan antara hasil pre-test dan post-test, dimana rata-rata skor peserta meningkat dari 55% menjadi 80% setelah pelatihan. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan pemahaman peserta terkait tata kelola dan transparansi anggaran desa. Kategori Keterlibatan dan Antusiasme Peserta meliputi data tentang kehadiran, partisipasi aktif, dan umpan balik positif. Kehadiran peserta mencapai 96%, menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelatihan. Sebanyak 60% peserta aktif bertanya dan berpartisipasi dalam diskusi, sementara 96% peserta memberikan umpan balik positif, menyatakan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat. Bagian Kesadaran yang Meningkat mengilustrasikan bagaimana wawasan peserta tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa telah meningkat. Peserta juga menunjukkan komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip

yang telah dipelajari dalam pengelolaan keuangan di desa mereka.

## SIMPULAN

Pelatihan tata kelola dan transparansi anggaran desa yang dilaksanakan berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan, termasuk dalam aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan anggaran desa. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan skor rata-rata dari 55% pada pre-test menjadi 80% pada post-test, yang mencerminkan efektivitas pelatihan dalam memperkuat pengetahuan peserta mengenai tata kelola yang baik, transparansi, dan aspek hukum yang mengatur pengelolaan anggaran desa. Salah satu pencapaian utama dari pelatihan ini adalah peningkatan kesadaran peserta tentang risiko hukum yang dapat muncul karena masukan anggaran desa. Peserta menjadi lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang tidak transparan atau akuntabel, seperti penyelewengan dana, yang dapat berujung pada sanksi hukum yang serius, termasuk pidana korupsi. Pengetahuan ini penting untuk membangun tata kelola desa yang tidak hanya efektif, tetapi juga taat hukum. Keterlibatan dan antusiasme peserta juga sangat tinggi, yang terlihat dari kehadiran sebesar 96% dan partisipasi aktif sebesar 60% selama sesi pelatihan. Umpan balik positif dari 96% peserta mengindikasikan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat, terutama dalam meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab hukum yang melekat dalam pengelolaan keuangan desa. Peserta menunjukkan komitmen yang lebih besar untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam tugas sehari-hari mereka, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran dan pelaporan yang lebih transparan. Dalam aspek hukum, pelatihan pada pengabdian ini memberikan peserta alat yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam konteks pengelolaan anggaran desa. Hal ini sangat penting untuk mencegah praktik-praktik korupsi dan memastikan bahwa dana desa digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pengabdian ini tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan umum dan keterampilan teknis peserta, tetapi juga memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam pengelolaan anggaran. Program ini dapat menjadi model yang kuat untuk pelatihan serupa di masa depan, yang dapat mencakup desa-desa lain untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldi. (2024). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA KABUNA KECAMATAN KAKULUK MESAK KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *IPDN*, 112, 1–15.
- Alfian Septyandi. (2023). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA AJI KUNING DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA ALFIAN. *IPDN*, 1–17.
- Bahtiar, R. A. (2023). Upaya Penguatan Pengelolaan Dana Desa. *Info Singkat*, XV(14), 1–5.
- Harianto, Mudji Rahardjo, B. M. B. (2022). *Pengelolaan Dana Desa dan Tindak Pidana Korupsi*. x–304.
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2), 95–115.
- Sangian, D. A., Dengo, S., & Pombengi, J. D. (2018). Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. *E-Journal Unsrat*, 2(1), 1–10.
- Wardana, D. J. (2019). Potik Hukum Pemerintahan Desa. In *Jurnal Justiciabelen* (Vol. 1, Issue 2). <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.827>